

ANALISIS PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PRIVATISASI TERHADAP KINERJA KEUANGAN

**(Studi pada BUMN yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Privatisasi
2002-2006)**

Disusun oleh : Ardian Ganang Riyanto (C2A007014)

Dosen Pembimbing : Harjum Muharam SE, ME.

ABSTRACT

At this time, many BUMN does privatization dan implementation good corporate governance, toward to eficiency and perform, eventhought , many of them are still breaking the law for good corporate governance, furthermore some of those option are not efective toward to performance. This research has purpose to find any empirical evidence about influence of many element of corporate governance's and also privatization implementation toward to performance of BUMN in Indonesia. The research about corporate governance's and also privatization perspective toward the performance has commonly focused, but any findings show inconsistency results. Further reconciliation of this result, it's interesting to make research with different object.

The hypothesis testing were using F test and t test with a significance level of 5%. As for measuring the validity and reliability this study using Pearson's product moment and cronbach's alpha. And the tool to test the statistical analysis is SPSS 17.0.

Results show that influence of corporate governance that proximate size board of commissioner, and audit committee have positively influence and also control variabel firm size have positively influence otherwise, education bussines background of vice president, existence of independent commissioner and Privatization. has negatively and significant influence

Key words: *Corporate governance's perspective, education bussines background of vice president, size board of commissioner, and audit committee, existence of independent commissioner, Privatization, NPM*

1. PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Corporate Governance* (CG) terhadap kinerja keuangan BUMN dan menguji perbedaan kinerja keuangan BUMN sebelum dan sesudah privatisasi. *Corporate Governance* diproksikan dengan variabel *board size*, komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah komite audit dan jumlah rapat komisi audit.

Kinerja perusahaan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar. Hasil dari kinerja tersebut harus dapat diukur dan menggambarkan kondisi empirik perusahaan (Hawkins, 1979). Perusahaan yang mempunyai kinerja yang bagus akan terjamin kelangsungan hidupnya karena akan mendapat kepercayaan dari publik, sehingga publik akan merasa nyaman untuk berinvestasi di perusahaan. Untuk mengetahui bagaimana kinerja yang dicapai oleh suatu perusahaan perlu dilakukan penilaian kinerja (Lingle et. al, 1996).

Metode penilaian kinerja yang digunakan selama ini, yaitu penilaian kinerja perusahaan dengan ukuran keuangan dan non keuangan. Sesuai dengan tujuan perusahaan yaitu mencari laba, maka hampir semua perusahaan mengukur kinerjanya dengan ukuran keuangan. Pengukuran dengan aspek keuangan lebih sering digunakan karena ada standar pembandingan yang potensial, baik berupa laporan keuangan dimasa lalu atau dengan laporan keuangan perusahaan lain yang sejenis (Hansen dan Mowen, 1997).

Laporan keuangan, dalam hubungannya dengan kinerja sering dijadikan dasar penilaian kinerja perusahaan karena dengan melihat laporan keuangan dapat diukur keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode tertentu (Ujiyantho et. al, 2007). Namun, seringkali besaran laba yang dihasilkan dalam laporan laba rugi dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan, sehingga laba yang tinggi belum tentu mencerminkan kas yang besar (Theresia, 2005)..

Kinerja perusahaan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar. Hasil dari kinerja tersebut harus dapat diukur dan menggambarkan kondisi empirik perusahaan. Perusahaan yang mempunyai kinerja yang bagus akan terjamin kelangsungan hidupnya karena akan mendapat kepercayaan dari publik, sehingga publik akan merasa nyaman untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Untuk mengetahui bagaimana kinerja yang dicapai oleh suatu perusahaan perlu dilakukan penilain kinerja (Lingle dan Schiemann, 1996). .

Dari sudut pandang kebijakan publik, privatisasi menurut sebagian peneliti, misalnya Guisllain (1997) dan Porter (1980), masih menjadi dilema untuk dijalankan pemerintah. Timbulnya dilema dikarenakan privatisasi mempunyai dampak yang luas dan tidak hanya membawa konsekuensi ekonomi, namun juga sosial dan politik. Keduanya menyatakan privatisasi menurunkan kinerja perusahaan apabila tidak dilakukan dengan persiapan yang bagus. Di berbagai negara, dorongan terhadap pelaksanaan privatisasi sangat kuat dipengaruhi oleh publik, terutama stakeholder dari perusahaan milik negara itu sendiri (Savas, 2000 dan Cowan, 1990). Dorongan yang kuat tersebut dilandasi oleh kepentingan stakeholder untuk meningkatkan kinerja dalam rangka memberikan kontribusi secara internal dalam bentuk perbaikan kinerja perusahaan dan kesejahteraan karyawan maupun secara eksternal bagi penerimaan negara.

Brich et. al, (2000) melakukan penelitian pengaruh privatisasi di dua dekade terakhir di Argentina, Chile, Brazil, Colombia, Mexico, Peru, Venezuela dan negara Caribbean. Hasil penelitian menunjukkan bahwa privatisasi mempunyai pengaruh positif pada kinerja perusahaan dan berpengaruh negatif pada tenaga kerja. Pengaruh privatisasi terhadap tenaga kerja bersifat negatif karena langkah yang sering ditempuh dalam privatisasi adalah pengurangan pegawai.

Kinerja keuangan perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah *corporate governance*. Sejak krisis yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 isu mengenai *corporate governance* telah menjadi salah satu bahasan penting yang menarik (Suhardjanto dan Apreria, 2010).

Mekanisme *good corporate governance* memiliki beberapa indikator yang berupa komite audit, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan latar belakang pendidikan komisaris. Banyak penelitian yang dilakukan untuk menguji keterkaitan antara mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian terdahulu lainnya yang telah dilakukan untuk menguji keterkaitan antara mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan. Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan tidak ada hubungan *corporate governance* dengan kinerja perusahaan (Daily et. al, 1998). *Corporate governance* tidak mempengaruhi kinerja secara langsung terutama. Di lain pihak menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai *poor performance* disebabkan oleh *poor governance*, adanya hubungan positif antara *corporate governance* dengan nilai/kinerja perusahaan (antara lain, Black et. al, 2003; Klapper dan Love, 2002; Mitton, 2000; dan Darmawati et. al, 2004).

Mitton (2000) menyatakan bahwa perbedaan hasil penelitian tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : 1) perspektif teoritis yang diterapkan 2) metodologi penelitian, 3) pengukuran kinerja, dan 4) perbedaan pandangan atas keterlibatan dewan dalam pengambilan keputusan. Walaupun penelitian-penelitian tentang hubungan *corporate governance* dengan kinerja perusahaan menunjukkan hasil yang berbeda, namun semuanya menyatakan bahwa *corporate governance* mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap kinerja perusahaan.

Untuk ukuran perusahaan, ada beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa adanya pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Besar kecilnya suatu perusahaan dapat ditentukan dengan beberapa hal, antara lain : total penjualan, total aset, rata-rata tingkat penjualan dan rata-rata total aset dimana mempengaruhi kinerja tapi tidak secara langsung. (ferri dan jones, 1979). Selain hal tersebut ada penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa secara umum perusahaan yang mempunyai total aset yang relatif besar dapat beroperasi dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi dibanding dengan perusahaan yang total asset rendah. Oleh karena itu perusahaan dengan total asset besar lebih mampu menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi (dalam Arrayani, 2003). Dalam pengertian bahwa perusahaan yang memiliki peralatan modern, fasilitas bagus serta sarana memadai akan lebih tinggi kinerjanya dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan kecil atau dengan kata lain mempunyai aset kecil. Sedangkan Herni et. al (2008) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak ada pengaruh secara langsung terhadap kinerja perusahaan, dengan meningkatkan ukuran perusahaan tidak dapat secara langsung meningkatkan kinerja keuangan.

Aspek *corporate governance* yang sudah banyak diteliti adalah dewan komisaris dan komite audit. Penelitian terdahulu belum banyak mengkaitkan latar belakang pendidikan presiden komisaris (komisaris utama) terhadap kinerja keuangan perusahaan, terlebih perusahaan BUMN. Variabel ini cukup layak untuk dimasukkan dalam model , Oleh karena itu, penulis menyimpulkan judul yang sesuai untuk penelitian ini adalah **“ANALISIS PENGARUH MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *PRIVATISASI* TERHADAP KINERJA KEUANGAN: Studi Pada BUMN Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Privatisasi 2002-2006”**

2. TELAAH PUSTAKA

2.1 Pengertian Kinerja Keuangan BUMN

Kinerja perusahaan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang ditetapkan. Kinerja perusahaan hendaknya merupakan hasil yang dapat diukur dan menggambarkan kondisi empirik suatu perusahaan dari berbagai ukuran yang disepakati. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui kinerja yang dicapai. Kata penilaian sering diartikan dengan kata *assessment*. Penilaian kinerja perusahaan (*Companies performance assessment*) mengandung makna suatu proses atau sistem penilaian mengenai pelaksanaan kemampuan kerja suatu perusahaan (organisasi) berdasarkan standar tertentu (Kaplan dan Norton, 1996).

Menurut Alexandri (2008: 200) *Net Profit Margin* (NPM) adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih setelah dipotong pajak.

2.2 Privatisasi

Privatisasi mempunyai pengertian yang luas. Beberapa definisi privatisasi dikemukakan antara lain oleh Savas (1987): “*Privatization is the act of reducing the role government, or increasing the role of private sector, in activity or in the ownership of assets.*” Berdasarkan definisi tersebut, setiap kebijakan yang mengurangi peran pemerintah dan memberikan kesempatan pada peran swasta adalah merupakan kebijakan privatisasi. Dengan menggunakan definisi Savas, kebijakan deregulasi dapat dianggap sebagai tindakan privatisasi, karena deregulasi juga bertujuan mengurangi peranan pemerintah dan memperkuat eksistensi pasar. Definisi Savas dianggap sebagai definisi yang bersifat luas tentang privatisasi.

Prawirasantosa, Setyanto (2007) menurutnya privatisasi adalah salah satu cara efektif memperbaiki kinerja BUMN dari faktor internal dan eksternal perusahaan tersebut, sehingga banyak perusahaan terutama BUMN melakukan privatisasi untuk memperbaiki kinerja perusahaan.

H₅: Privatisasi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.3 *Good Corporate Governance*

Pada tahun 1999, Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 telah mengeluarkan Pedoman *Corporate Governance* (CG) yang pertama. Pedoman tersebut telah

beberapa kali disempurnakan, terakhir pada tahun 2001. Berdasarkan pemikiran bahwa suatu sektor ekonomi tertentu cenderung memiliki karakteristik yang sama, maka pada awal tahun 2004 dikeluarkan Pedoman *Corporate Governance* Perbankan Indonesia dan pada awal tahun 2006 dikeluarkan Pedoman *Corporate Governance* Perasuransian Indonesia.

Definisi *corporate governance* dirumuskan oleh Jill et. al, (2005), pada bukunya yang berjudul *Corporate Governance and Accountability*, yaitu *corporate governance* adalah sistem pengawasan dan keseimbangan baik internal maupun eksternal kepada perusahaan, yang menjamin bahwa perusahaan akan melaksanakan kewajibannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*) dan bertindak dengan tanggung jawab sosial dalam segala bidang dari bisnis perusahaan yang bersangkutan. Dengan bisa terukurnya praktik *corporate governance* di tingkat perusahaan, banyak penelitian yang berhasil menemukan adanya hubungan positif antara *corporate governance* dengan nilai/kinerja perusahaan (antara lain, Black et. al, 2003; Klapper et. al, 2002; Mitton, 2000; dan Darmawati et. al, 2004).

2.4 Board Size

Dewan komisaris adalah adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas). Perusahaan akan bergantung pada dewannya untuk dapat mengelola sumber dayanya secara lebih baik sehingga dapat meningkatkan profitabilitas. (Sutojo et. al, 2006).

Board of directors atau dewan komisaris memiliki dua fungsi utama di dalam sebuah perusahaan. Fungsi servis berarti bahwa dewan komisaris dapat memberikan konsultasi dan nasihat kepada manajemen. Kedua, fungsi kontrol yang dilakukan oleh dewan komisaris (dalam teori agensi) mewakili mekanisme internal utama untuk mengontrol perilaku oportunistik manajemen sehingga dapat membantu menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajer (FCGI, 2002).

H₁: Board size berpengaruh positif terhadap tingkat kinerja keuangan

2.5 Proporsi Dewan Komisaris

Komisaris adalah lembaga yang bertugas mengawasi atau mengontrol jalannya perusahaan yang dipimpin oleh dewan direksi (Emirzon, 2007). Disebutkan dalam Emirzon (2007), pembentukan Komisaris Independen ini dimotivasi oleh keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dalam PT terbuka. Berdasarkan keputusan

Direksi BEJ (sekarang BEI) nomor: KEP-399/BEJ/07-2001 (dalam Nurmala et. al. 2007) yaitu Pencatatan Efek Nomor I-A, komisaris independen bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi, dan memberikan nasihat kepada direksi jika diperlukan.

Pelaksanaan *good corporate governance* terutama komisaris independent dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan komisaris dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri dan umumnya GCG dapat meningkatkan kepercayaan investor (dalam Trinanda et. al, 2010)

Proporsi komisaris independen sangat diperhitungkan. Seperti pada ketentuan di Pasar Modal dalam Surat Direksi PT. Bursa Efek Jakarta (sekarang BEI) nomor: KEP-399/BEJ/07-2001 tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa poin C.

H₂: Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

2.6. Latar Belakang Pendidikan Komisaris Utama.

Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh komisaris utama berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (Ahmed at. al, 1994). Komisaris utama yang memiliki latar belakang pendidikan bisnis akan lebih baik dalam mengelola perusahaan dibandingkan dengan komisaris utama yang tidak memiliki pendidikan bisnis (Bray, et. al, 1995). Sedangkan Santrock (1995) menyatakan bahwa seseorang berpendidikan tinggi akan memiliki jenjang karir lebih tinggi dan lebih cepat.

H₃: Latar belakang pendidikan komisaris utama berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.7 Komite Audit

Pengertian komite audit dalam Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-29/PM/2004, tertanggal 24 September 2004 pada Peraturan nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Keberadaan komite audit pada saat ini telah diterima sebagai suatu bagian dari organisasi perusahaan (*Corporate Governance*). Bahkan untuk menilai pelaksanaan *good corporate governance* di perusahaan, adanya komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek dalam kriteria penilaian.

H₄: Jumlah komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.8. Ukuran Perusahaan

Salah satu tolok ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran perusahaan. Penentuan ukuran perusahaan dapat dinyatakan dengan total penjualan, total aset, rata-rata tingkat penjualan dan rata-rata tingkat aset. Faktor ukuran perusahaan yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan merupakan faktor penting dalam pembentukan laba. Perusahaan besar yang dianggap telah mencapai tahap kedewasaan merupakan suatu gambaran bahwa perusahaan tersebut relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan kecil (dalam Seniwati, 2008).

Bagi perusahaan yang stabil biasanya dapat memprediksi jumlah keuntungan ditahun-tahun mendatang karena tingkat kepastian laba sangat tinggi. Sebaliknya bagi perusahaan yang belum mapan besar kemungkinan laba yang diperoleh juga belum stabil karena kepastian laba lebih rendah. (Elisabeth, 1997)

H₆: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.9. Kinerja Perusahaan

Laba merupakan indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan. Laba berfungsi untuk mengukur efektivitas bersih dari sebuah usaha bisnis. Kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dari tingkat perolehan laba. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aset maupun modal sendiri (Herni et al, 2008).

Tingkat NPM yang tinggi menunjukkan bahwa kinerja perusahaan baik dan pengawasan berjalan dengan baik, sedangkan dengan tingkat profitabilitas yang rendah menunjukkan bahwa kinerja perusahaan kurang baik, dan kinerja manajemen tampak buruk di mata principal.

3. METODE PENELITIAN

Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan teknik *proporsional*. Populasi digunakan dalam penelitian ini adalah BUMN yang telah diprivatisasi melalui IPO (*initial public offering*) atau yang terdaftar pada BEI yang berjumlah 20 BUMN. Dikarenakan penelitian menggunakan *time series* 2 tahun sebelum privatisasi dan 4 tahun setelah privatisasi, sehingga sampel yang digunakan adalah BUMN yang melakukan privatisasi antara tahun 2002-2007 jadi ada 10 sampel yang digugurkan karena tidak sesuai dengan kriteria.

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

a. Variabel independen

1) *Dummy* variabel *Board size*

Indikator yang digunakan sesuai dengan penelitian Jansen (1993) yaitu jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris yang dimiliki perusahaan baik yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan yang dibawah 1-7 memakai angka 1 dan lebih dari 7 memakai angka 0

$$Ukuran\ Dewan\ Komisaris = \sum\ Komisaris\ Internal + \sum\ Komisaris\ Eksternal$$

2) Proporsi komisaris independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-matademi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2004). Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan menggunakan indikator persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan.

$$Proporsi\ komisaris\ independen = \frac{\sum\ komisaris\ Independen}{\sum\ Board\ Size} \times 100\%$$

3) *Dummy* variabel Latar belakang pendidikan presiden komisaris

Indikatornya $D_1 = 0$, indikator komisaris yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan
Bisnis.

$D_1 = 1$, indikator komisaris yang mempunyai latar belakang pendidikan
Bisnis.

4) Komite Audit Independen

Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal) dapat mengurangi sifat *opportunistic* manajemen yang melakukan manajemen laba (*earnings*

management) dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal. Komit yaitu jumlah komite audit yang dimiliki perusahaan (Junaidi, 2007). Variabel ini menunjukkan jumlah komite audit pada perusahaan antara periode tahun penelitian.

5) Dumy Variabel Privatisasi.

Indikatornya $D_1 = 0$, indikator BUMN yang belum diprivatisasi.

$D_1 = 1$, indikator BUMN yang telah diprivatisasi.

b. Variabel Kontrol

1) Ukuran perusahaan.

Ukuran perusahaan diukur menggunakan log natural total asset, mengacu pada penelitian Seniwati (2008).

Ukuran perusahaan= \ln total ase

c. Variabel dependen

1) Kinerja Keuangan BUMN

Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Suhardjanto dan Apreria (2010), laba (NPM) digunakan sebagai proksi untuk mengukur kinerja keuangan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NPM = \frac{\text{Laba Bersih- pajak}}{\text{Penjualan bersih}}$$

4. HASIL DAN ANALISIS

4.1 Analisis Data Deskriptif

Tabel 4.1
Deskripsi Variabel

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |

Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai ukuran dewan komisaris adalah antara 2 sampai dengan 9 dengan rata-rata sebesar 5 dan standar deviasi sebesar 1,796. Tampak bahwa terdapat perusahaan dengan jumlah komisaris hanya 2 orang yaitu PT Bank Negara Indonesia Tbk. pada 2 tahun dan 1 tahun sebelum melakukan privatisasi dan juga PT Kalbe Farma Tbk. pada 2 tahun dan 3 tahun setelah melakukan privatisasi. Jumlah dewan komisaris sebanyak 9 terdapat pada PT. Indocement Tunggul Prakasa Tbk. pada 1 tahun sebelum dan setelah melakukan privatisasi dan juga PT Indosat Tbk. pada 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan 4 tahun setelah melakukan privatisasi, Rata-rata jumlah dewan komisaris pada perusahaan adalah sekitar 5 orang. Dalam penelitian ini, jumlah dewan komisaris diukur dengan *dummy* yaitu 0 untuk jumlah di atas 7 orang dan 1 untuk 7 ke bawah.

Proporsi komisaris independen adalah antara 0,111 sampai dengan 0,667 dengan rata-rata sebesar 0,38567 dan standar deviasi sebesar 0,122208. Perusahaan yang komisaris independen paling sedikit adalah PT Indocement Tunggul Prakasa Tbk. pada 1 tahun sebelum melakukan privatisasi. Jumlah komisaris independen terbanyak terdapat pada PT. Indofarma Tbk. pada 1 tahun dan 2 tahun setelah privatisasi dan PT Semen Gresik Persero Tbk. pada 4 tahun setelah privatisasi. Jumlah komisaris independen rata-rata pada perusahaan sampel adalah sebanyak 36,567% dari total komisaris pada perusahaan yang bersangkutan.

Jumlah komite audit adalah antara 2 sampai dengan 7 dengan rata-rata sebesar 4 dan standar deviasi sebesar 1,010. Perusahaan dengan jumlah komite audit 2 orang adalah PT. Aneka Tambang Tbk. pada 2 tahun sebelum privatisasi, PT Bank Negara Indonesia Tbk. pada 1 tahun sebelum privatisasi, PT Kalbe Farma Tbk. pada 3 tahun setelah privatisasi dan PT Telekomunikasi Indonesia pada 4 tahun setelah privatisasi. Jumlah komite audit sebanyak 7 orang terdapat pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. pada 3 tahun setelah privatisasi. Jumlah komite audit rata-rata pada perusahaan sampel adalah sekitar 4 orang.

Ukuran perusahaan adalah antara Rp. 518, 824 Milliar sampai dengan Rp. 154,725 Trillyun dengan rata-rata sebesar Rp. 26,483 Trillyun. Perusahaan dengan ukuran perusahaan terkecil adalah PT. Indofarma Tbk. pada 2 tahun setelah privatisasi dan perusahaan terbesar adalah PT. Bank Negara Indonesia Tbk. pada 4 tahun setelah privatisasi.

Nilai NPM adalah berkisar antara -0,36 sampai dengan 0,87 dengan rata-rata sebesar 0,1638 dan standar deviasi sebesar 0,18096. Perusahaan yang mengalami kerugian terbesar adalah PT.

Indocement Tunggal Prakasa Tbk. pada 2 tahun sebelum privatisasi dan perusahaan dengan profit tertinggi berdasarkan NPM adalah PT. Indofarma Tbk. pada 4 tahun setelah privatisasi.

Statistik deskriptif variabel penelitian yang menggunakan pengukuran *dummy* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Analisis Deskriptif Variabel Pendidikan Berdasarkan Kinerja Perusahaan

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Kode: 0 : Tidak berbasis bisnis

1: Berbasis bisnis

Tampak bahwa terdapat 27 perusahaan sampel yang mempunyai presiden komisaris tanpa latar pendidikan bisnis dan 33 perusahaan sampel yang mempunyai presiden komisaris berlatar belakang pendidikan bisnis. Nilai kinerja perusahaan yang diukur dengan NPM menunjukkan bahwa perusahaan dengan presiden komisaris berlatar pendidikan bisnis mempunyai nilai yang lebih rendah yaitu sebesar 0,1558 ($< 0,1737$).

Tabel 4.3

Analisis Deskriptif Variabel Privatisasi Berdasarkan Kinerja Perusahaan

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sumber: Data sekunder diolah, 2011 (Lampiran B)

Kode: 0 : Sebelum privatisasi

1: Setelah privatisasi

Tampak bahwa terdapat 20 perusahaan sampel sebelum privatisasi dan 40 sampel perusahaan setelah privatisasi. Nilai NPM sesudah privatisasi lebih tinggi dibandingkan nilai NPM sebelum privatisasi ($0,1845 > 0,1225$).

Tabel 4.4
Analisis Deskriptif Variabel Ukuran Dewan Komisaris Berdasarkan Kinerja Perusahaan

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sumber: Data sekunder diolah, 2011 (Lampiran B)

Kode: 0: di atas 7 orang

1 : 1 – 7 orang

Tampak bahwa terdapat 7 perusahaan dengan jumlah dewan komisaris di atas 7 dan terdapat 53 perusahaan dengan jumlah dewan komisaris 1 sampai dengan 7 orang yang dianggap lebih efektif dalam melakukan pengawasan. Tampak juga bahwa nilai NPM dengan jumlah dewan komisaris 1 sampai dengan 7 orang lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan jumlah dewan komisaris di atas 7 ($0,1679 > 0,1329$).

4.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.1 Uji Normalitas

Tabel 4.5
One Sample Kolmogorov-Smirnov

| | |
|--|--|
| | |
| | |

Tabel di atas menunjukkan bahwa taraf signifikansi adalah sebesar $0,903 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa nilai residualnya telah terdistribusi secara normal. Dengan demikian hasil ini memperkuat hasil pengujian normalitas dengan menggunakan P Plot.

4.2.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 4.6
Uji Multikolinearitas

| Model | | Collinearity Statistics | |
|-------|-------------------------------|-------------------------|-------|
| | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | | |
| | Ukuran Dewan Komisaris | .867 | 1.154 |
| | Proporsi Komisaris Independen | .693 | 1.443 |
| | Pendidikan | .769 | 1.300 |
| | Komite Audit | .698 | 1.433 |
| | Privatisasi | .697 | 1.435 |
| | Ukuran Perusahaan | .834 | 1.199 |

Tabel di atas memberikan semua nilai VIF di bawah 10 atau nilai *tolerance* di atas 0,1 dengan nilai VIF tertinggi adalah sebesar 1,443 untuk variabel privatisasi. Berarti tidak terdapat gejala multikolinearitas pada model dalam penelitian ini.

4.2.3 Uji Autokorelasi

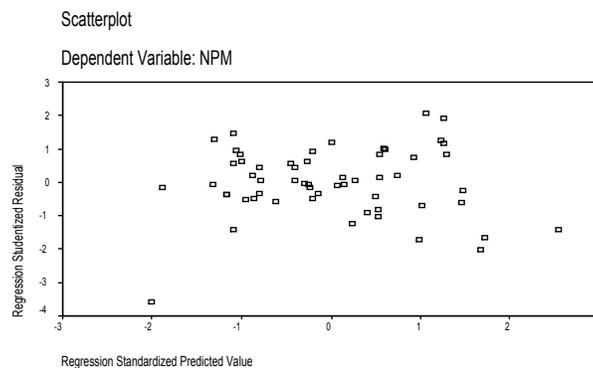
Tabel 4.10

Uji Autokorelasi dengan Durbin-Watson

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |

Nilai DU untuk N = 57 pada 5% adalah sebesar 1,812. Tampak bahwa $DU < DW < (4-DU)$ atau $(1,812 < 2,002 < 2,188)$ yang masuk pada kategori tidak terdapat gangguan autokorelasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat gangguan autokorelasi pada model penelitian ini.

4.2.4 Uji Heterokedastisitas



Gambar 4.3

Uji Heteroskedastisitas

Tampak pada grafik bahwa titik-titik pada grafik telah tersebar merata baik di bawah sumbu nol maupun di atas sumbu nol. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas pada model penelitian.

4.3 Analisis Regresi Berganda

4.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.9
Tabel Uji R Square

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |

Tabel tersebut memberikan nilai R sebesar 0,588 dan koefisien determinasi dengan *Adjusted R Square* sebesar 0,268. Tampak bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varians variabel terikat adalah relatif rendah yaitu hanya sebesar 26,8%. Artinya faktor lain yang menjelaskan varians profitabilitas selain keenam variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 73,2%. Sedangkan *Standar Error of Estimate* (SEE) sebesar 0,10869. Makin kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen. Penelitian ini menghasilkan R^2 sebesar 26,8 %, relatif besar dibanding dengan penelitian terdahulu, seperti Todd Mitton (2002) R^2 sebesar 17%, Galiani et. al, (2003) R^2 sebesar 20% dan Seniwati (2008) R^2 sebesar 15%.

4.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

Tabel 4.10

Uji F

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |

Tampak bahwa nilai F hitung adalah sebesar 4,412 dengan taraf signifikansi sebesar 0,001. Nilai signifikansi adalah di bawah 0,05 menunjukkan bahwa variabel bebas secara serempak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap NPM.

4.3.3 Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)

Berdasarkan tabel 4.13 maka dapat dilakukan pengujian hipotesis terhadap masing-masing variabel penelitian, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.11

Uji Signifikansi Variabel

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |

Berdasarkan Tabel 4.10, maka dapat dibentuk persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = -0,468 + 0,138 X_1 - 0,061X_2 - 0,004X_3 + 0,040 X_4 + 0,021 X_5 + 0,021 X_6$$

4.4. Interpretasi Hasil

4.4.1. Interpretasi Hasil Pengujian Statistik untuk H₁

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan komisaris berpengaruh secara positif terhadap kinerja pada tingkat signifikan 5%. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh secara positif signifikan terhadap kinerja perusahaan diterima. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Muh. Arief Ujjiyantho et. al, (2007), Dalton et al (dalam Wardhani, 2006)

Temuan ini menunjukkan bahwa *board size* merupakan salah satu mekanisme *corporate governance* yang mampu mempengaruhi kinerja keuangan. Jika dilihat dari pola hubungannya, maka pengaruhnya adalah positif. Artinya, perusahaan dengan kategori 1, semakin tinggi kinerja pada laporan keuangan. Berdasarkan *review* penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa hasil penelitian ini tidak mendukung atau bertentangan dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Ahmed dan Nichols (1994).

Beberapa peneliti lain menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif secara signifikan terhadap manajemen laba, makin sedikit dewan komisaris maka tindak kecurangan makin banyak karena sedikitnya dewan komisaris memungkinkan bagi organisasi tersebut Bedard et. al, (2001) dan Xie et. al, (2003).

4.4.2. Interpretasi Hasil Pengujian Statistik untuk H₂

Hasil pengujian hipotesis kedua menyimpulkan bahwa komisaris independen secara signifikan tidak berpengaruh terhadap kinerja. Dengan demikian, hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dalton et. al, (1994) Suhardjanto dan Apreria (2010). Sylvia et. al, (2005), Sam'ani (2008) juga menyatakan bahwa pengangkatan dewan komisaris independen oleh perusahaan mungkin hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja tapi tidak dimaksudkan untuk menegakkan *Good Corporate Governance* (GCG) di dalam perusahaan. Kondisi ini juga ditegaskan dari hasil survai *Asian Development Bank* dalam Boediono Gideon (2005) yang menyatakan bahwa kuatnya kendali pendiri perusahaan dan kepemilikan saham mayoritas menjadikan dewan komisaris tidak independen. Fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi tanggungjawab anggota dewan menjadi tidak efektif. Keberadaan komisaris independen ini tidak dapat meningkatkan efektifitas monitoring yang dijalankan oleh komisaris.

Masih banyak perusahaan BUMN yang mempunyai komisaris independen dibawah 30%, seharusnya menurut aturan Bapepam, proporsi komisaris independen terhadap total komisaris adalah sebesar 30 persen, dan menurut aturan PBI No. 14 tahun 2006 menyatakan bahwa dewan komisaris terdiri dari komisaris dan komisaris independen, di mana setidaknya 50 persen dari jumlah anggota dewan komisaris adalah komisaris independen.

Berdasar data yang ada, sebagian besar komisaris independen terdiri dari pejabat publik ataupun tokoh masyarakat, yang belum tentu memiliki keahlian dalam konteks manajemen perusahaan. Sebagian besar anggota komisaris ternyata juga menjabat sebagai komisaris dan direksi di perusahaan lain (*cross-directorships*), baik perusahaan yang berkaitan maupun perusahaan lain. Mantan pejabat pemerintahan ataupun yang masih aktif, biasanya diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris suatu perusahaan dengan tujuan agar mempunyai akses ke instansi pemerintah yang bersangkutan (Sam'ani, 2008). Dalam hal ini integritas dan kemampuan Dewan Komisaris seringkali menjadi kurang penting.

4.4.3. Interpretasi Hasil Pengujian Statistik untuk H₃

Hasil pengujian hipotesis ketiga menyimpulkan bahwa latar belakang pendidikan komisaris utama secara signifikan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dimana disebabkan oleh penelitian mengenai mekanisme GCG seharusnya dilakukan dalam jangka panjang karena tidak mungkin dalam satu atau dua tahun pergantian komisaris utama dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Gompers et. al, (2003) dalam Darmawati (2004) yang menemukan hubungan positif antara mekanisme *corporate governance* dengan kinerja perusahaan jangka panjang. Dalam jangka pendek pergantian komisaris utama akan menyebabkan penurunan kinerja disebabkan adanya transformasi yang menimbulkan konflik, yang dapat melewati tahap tersebut akan terjadi peningkatan kinerja sedangkan yang tidak berhasil melewati tahap tersebut dengan baik, kinerja perusahaan akan terus bermasalah Darmawati (2004).

4.4.4. Interpretasi Hasil Pengujian Statistik untuk H₄

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa variabel komite audit berpengaruh secara positif terhadap kinerja pada tingkat signifikan 5%. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh secara positif signifikan terhadap kinerja perusahaan diterima. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhardjanto et. al, (2010). Sehingga terbukti bahwa adanya komite audit yang efektif dapat meningkatkan

kinerja perusahaan karena dapat menekan terjadinya penyimpangan-penyimpangan akuntansi yang sering dilakukan oleh banyak perusahaan di Indonesia.

Perusahaan BUMN di Indonesia yang telah membentuk komite audit sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai pembentukan komite (Surat Edaran BAPEPAM No. SE-03/PM/2000 dan No. Peng-4247/BEJ-PEM 09-2002) terbukti dapat meningkatkan kinerja perusahaan karena adanya peningkatan kepercayaan investor terhadap akuntabilitas perusahaan tersebut. Dengan kata lain, investor mulai memperhatikan kepatuhan perusahaan dalam penerapan GCG, khususnya keberadaan komite audit dalam proses pengambilan keputusan sehubungan dengan investasinya pada perusahaan tersebut.

Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal) sehingga dapat mengurangi sifat *opportunistic* manajemen yang melakukan kecurangan dalam bentuk *earnings management* dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal.

4.4.5. Interpretasi Hasil Pengujian Statistik untuk H₅

Hasil pengujian hipotesis kelima menyimpulkan bahwa variabel privatisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal ini sesuai dengan Joel T Harper (2002). Dimana pengaruh privatisasi tidak bisa dilihat dalam waktu dekat, privatisasi adalah salah satu cara meningkatkan kinerja perusahaan yang dapat dilihat dalam jangka panjang. Keberhasilan privatisasi dipengaruhi oleh banyak hal antara lain kondisi ekonomi, infrastruktur dan politik. Di Indonesia setelah melakukan privatisasi tahap pertama tahun 2002 kondisi ekonomi cenderung stabil, infrastruktur memadai dan kondisi politik bagus, sehingga dari penelitian sebenarnya ada peningkatan kinerja tetapi tidak signifikan, kemungkinan dikarenakan kondisi BUMN sebelum privatisasi kebanyakan tidak bagus sering rugi maka BUMN tersebut di privatisasi dengan tujuan meningkatkan kinerjanya. Penelitian ini hanya menggunakan 4 tahun setelah privatisasi sehingga pengaruh terhadap kinerja belum terlihat jelas, kebanyakan kinerja BUMN setelah privatisasi masih stabil atau bahkan mengalami penurunan kinerja akibat perubahan-perubahan yang terjadi dalam efektivitas kinerja.

Lebih lanjut penelitian ini berbeda dengan Galiani et. al, (2003) yang menyatakan bahwa privatisasi dapat meningkatkan kinerja perusahaan sebesar 188%. Hal ini yang menyebabkan

Argentina terhindar dari krisis ekonomi tahun 2003 di Amerika Latin, yang menyebabkan negara-negara lain kondisi perekonomiannya kacau.

4.4.6. Interpretasi Hasil Pengujian Statistik untuk H_6

Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh secara positif terhadap kinerja pada tingkat signifikan 5%. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara positif signifikan terhadap kinerja perusahaan diterima. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Seniwati (2008), perusahaan dengan total aset besar mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Secara umum perusahaan yang mempunyai total aset yang relatif besar dapat beroperasi dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi dibanding dengan perusahaan yang total aset rendah.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian hipotesis 1 dalam penelitian ini diterima.
2. Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian hipotesis 2 dalam penelitian ini ditolak.
3. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian hipotesis 3 dalam penelitian ini ditolak.
4. Jumlah komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian hipotesis 4 dalam penelitian ini diterima.
5. Privatisasi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian hipotesis 5 dalam penelitian ini ditolak.
6. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian hipotesis 6 dalam penelitian ini diterima.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian. Adapun beberapa keterbatasan adalah :

1. Jumlah pengamatan yang digunakan didalam penelitian ini relatif sedikit dan periode yang pendek, yakni terbatas pada BUMN yang listed di BEI tahun 2000 hingga 2008, hal ini terkait dengan adanya keterbatasan objek penelitian yang melakukan privatisasi menggunakan IPO kebanyakan privatisasi dilakukan menggunakan PP. Padahal masih banyak

perusahaan BUMN lain yang mungkin dapat dijadikan sebagai objek penelitian (BUMN yang melakukan privatisasi melalui PP). Sehingga hasil penelitian tidak dapat di generalisir pada konteks BUMN yang lebih luas di Indonesia.

2. Variabel *corporate governance* yang ada kurang dapat mengukur secara komprehensif realitas dari praktik *corporate governance* dalam perusahaan, sehingga perlu adanya indeks tertentu yang mencerminkan praktik *corporate governance* secara lebih tepat. Selain itu karakteristik komisaris independen dan komite audit secara spesifik tidak disertakan, misalnya kompetensi, keahlian, latar belakang pendidikan, pengalaman komisaris independen dan komite audit.
3. Privatisasi biasanya berpengaruh untuk jangka waktu yang panjang, sehingga penelitian tentang privatisasi yang dilakukan dalam jangka pendek cenderung kinerjanya lebih buruk atau stabil.
5. Banyak BUMN yang di privatisasi pada tahun 2008, yang tidak bisa dimasukkan dalam penelitian ini karena untuk data 4 tahun setelah privatisasi belum ada yaitu tahun 2011.

5.4. Saran

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi, implikasi manajerial dari hasil temuan penelitian ini untuk setiap variabelnya adalah sebagai berikut:

5.4.1 Bagi Investor

Untuk para investor, sebelum menanamkan modalnya terlebih dahulu mengetahui hasil penelitian ini, karena pada penelitian ini ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi keputusan investasi, pertama adalah variabel ukuran perusahaan, dimana para investor sebaiknya menanamkan modalnya pada perusahaan dengan ukuran perusahaan besar untuk mendapatkan jaminan laba yang besar pula, karena pada penelitian ini dinyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kemudian keputusan investasi hendaknya juga didasari pengetahuan faktor internal seperti mekanisme GCG, dalam penelitian ini ada 2 variabel mekanisme GCG yang berpengaruh positif dengan kinerja keuangan, yang pertama adalah *board size* dengan jumlah antara 1-7, karena pada jumlah ini para dewan komisaris dapat berkomunikasi dengan baik dalam setiap pengambilan keputusan, yang kedua adalah komite audit, semakin banyak komite audit maka semakin positif kinerjanya, adanya komite audit akan mengurangi praktek korupsi sehingga dapat meningkatkan kinerjanya.

5.4.2 Bagi Perusahaan.

1. Mekanisme *corporate governance* mampu mengendalikan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan, sehingga dapat menekan terjadinya masalah keagenan (*agency problem*) karena dapat menselaraskan perbedaan kepentingan atau tujuan antara pihak agen dengan prinsipal maupun pihak prinsipal (pemegang saham) dengan prinsipal lainnya (pemberi pinjaman), serta di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Mekanisme yang optimal dalam pengelolaan perusahaan akan menciptakan suatu kondisi perusahaan yang baik, pada akhirnya akan tercapai efisiensi perusahaan.
2. Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* seperti *board size* dan komite audit yang sesuai dengan kebutuhan maka akan menghasilkan peningkatan kinerja keuangan ditunjukkan dengan meningkatnya NPM, untuk variabel mekanisme yang lain tidak terlalu berpengaruh tetapi apabila lebih diperbaiki penerapannya kemungkinan akan memiliki pengaruh positif.
3. Privatisasi dalam jangka pendek akan cenderung menurunkan kinerja, sehingga untuk melakukan privatisasi dengan tujuan menaikkan kinerja harus direncanakan dengan maksimal terlebih dahulu.

5.4.3. Bagi Pemerintah

Wacana untuk meningkatkan kinerja perusahaan BUMN dengan melakukan privatisasi harus dikaji ulang, dimana dalam penelitian ini dampak privatisasi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, ada pendapat yang menyatakan privatisasi seharusnya didukung oleh faktor-faktor, kondisi politik yang stabil, kondisi ekonomi baik, serta infrastruktur memadai, sehingga akan lebih baik pemerintah terlebih dahulu fokus terhadap faktor yang mendukung privatisasi sebelum melakukan privatisasi.

Untuk penerapan mekanisme GCG sendiri, ada 2 yang signifikan terhadap peningkatan kinerja yaitu *board size* dan jumlah komite audit, *board size* sendiri dalam kategori 1 (1-7 anggota) signifikan terhadap kinerja keuangan karena pada kondisi tersebut adalah kondisi optimal dewan komisaris bekerja dengan komunikasi yang baik. Sehingga pemerintah tidak perlu menambah jumlah dewan komisaris karena anggapan semakin banyak yang mengerjakan semakin baik hasilnya, dalam penelitian ini tidak terbukti sama sekali. Jumlah komite audit berhubungan positif terhadap kinerja keuangan, sehingga pemerintah harus selalu memantau kinerja komite audit karena disektor inilah yang rawan praktek korupsi, semakin banyak komite audit akan semakin sedikit peluang manajemen laba atau tindakan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed and Nichols. 1994. "Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris dan Komite Independen dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Keuangan". *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 71 No.4 pp 401-425.
- Alexandri, Moh. Benny. 2008. *Manajemen Keuangan Bisnis*. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta. Diakses dari www.pdf-search-engine.com
- Arafat, Wilson. 2008. *How to Implement GCG Effectively*. Skyrocketing Publisher. Jakarta
- Arrayani, 2003. "Analisis faktor-Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal dan Implikasi Terhadap Rentabilitas Modal Sendiri Pada BUMN yang Go Publick di Indonesia". Tesis. Jakarta
- Arsjah, Regina jansen. 2002. "Pengaruh *Corporate Governance* pada Kinerja Perusahaan di Bursa Efek Jakarta". Tesis Magister Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia.
- Bastian, Indra. 2002. *Privatisasi di Indonesia: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Beasley, Mark S. 1996. "An Empirical Analysis of the Relation between the Board of Director Composition and Financial Statement Fraud". *The Accounting Review*, Vol. 71 No.4 pp 443-465.
- Daily, C., Dalton, D., 1994. "Board of directors leadership and structure: Control and performance implications". *Entrepreneurship theory and practice*. Vol. 17, pp. 65-81.
- Darmawati, Deni; Khomsiyah; Rika, 2004. "Analisis Indikator *Corporate Governance* terhadap Kinerja Perusahaan dan Manajemen Laba". *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)*, SNA VII Denpasar – Bali, 2- 3 Desember.
- Effendi, Muh. Arief. 2009. *The Power of Good Corporate Governance : Teori dan Aplikasi*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Emirzon, C. 2007. *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance: Paradigma Baru Dalam Praktik Bisnis Indonesia*. Yogyakarta. Genta Press. .
- Forum for Corporate Governance in Indonesia. 2003. *Indonesian Company Law*. Available online at www.fcgi.org.id

- Frediawan, R. 2008. "Pengaruh Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Studi Kasus pada PT Jamsostek Kantor Cabang II Bandung (Skripsi)". Bandung: Program Studi Akuntansi Universitas Widyatama. <http://skripsi-manajemen.blogspot.com/2011/02/Corporate-governance-pengertian-definisi.html>. diakses pada tanggal 20 mei 2011.
- Galiani, Sebastian; Paul Gertler; Ernesto Schargrodsky; and Federico Struzenegger. 2003. "*The Costs and Benefits of Privatization in Argentina: A Microeconomic Analysis*". *Latin American Research Network Working Paper R-454*. Washington, DC, United States: *Inter-American Development Bank, Research Department*
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi Kedua. Penerbit Universitas Dipenegoro. Semarang.
- Gujarati, Damodar N. 1992. *Ekonometrika Dasar*, Edisi Kedua, Jakarta: Erlangga.
- Gompers, P., Ishii, L. and Metrick, A. 2003. "*Corporate Governance and Equity Prices*". *Quarterly Journal of Economics*. Vol. 118. pp: 107-155
- Harper, Joel T. 2002. "Privatisasi Kinerja Perusahaan Pada Negara Republik Ceko. Keuangan dan *Real Estate Department*". *College of Business, Florida Atlantic University*.
- Herwidayatmo. 2000. *Implementasi Good Corporate Governance untuk perusahaan public Indonesia*. Usahawan, Oktober No. 10 Th XXIX : 25-32.
- Iqbal, Syaiful. 2007. "*Corporate Governance* Sebagai Alat Pereda Praktik Manajemen Laba (*Earning Management*)". *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi Ventura* Vol 10 No 3 Desember 2007 h. 29-47.
- J. H. Lingle & W. A. Schiemann, "From Balanced Scorecard to Strategic Gauges: Is Measurement Worth It?" *Management Review*, 85 (1996): 56-62.
- Jensen, M.C. 1993. "The Modern Industrial Revolution, exit and the Failure of Internal Control System". *Journal Of Finance* 48 (Juli): 831-880
- Jill and A. Solomon. 2005. *Corporate Governance and Accountability*. eBay Product ID: EPID5963832.
- Kaplan, R. dan D. Norton. 1996. *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action*, edisi satu. United States Of America : Harvard Business School Press.
- Klapper, L. And Love, 2002. dalam Setyawan 2006. *Corporate Governance, Investor Protection and Performance in Emerging Markets*. World bank. Working Paper.
- L. Syamsuddin. 2000. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Edisi Baru. Cetakan Kelima. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mitton, Todd., 2002. A Cross-Firm Analysis of the Impact of Corporate Governance on the East Asian Financial Crisis. *Journal of Financial Economics*. Vol. 64. 215-241.
- Nurmala, A. dan M. S. Kurniawan. 2007. "Analisis Profitabilitas Sebelum dan Sesudah Pemenuhan Corporate Governance pada Perusahaan Manufaktur yang Go Publik di Bursa Efek Jakarta". Maksi: Program Studi Magister Sains Akuntansi vol. 7 no. 2 (Agu. 2007)

- Pranata, Yudha, 2007, "Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan". Skripsi. Dipublikasikan. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Prawirasantosa, Setyanto. 2007. "Kebijakan Privatisasi dan Implikasinya terhadap Kinerja Badan Usaha Milik Negara: Studi kasus PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk". Disertasi. Tidak Dipublikasikan. Universitas Diponegoro. Semarang
- Sam'ani. 2008. "Pengaruh Good Corporate Governance Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2004 – 2007". Jurnal Manajemen Vol 10, hal 20-27. Jakarta
- Santosa. dan Setyanto, P. 1994. "Strategi Menghadapi Perubahan Lingkungan Bisnis (Telkom Case)". Karya Ilmiah. Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulia, Jakarta.
- Sartono. 1999. Manajemen keuangan. Edisi revisi. penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Savas, E. S. 1987. "Privatization: The Key to Better Government". New York: Chatham House.
- Savas, E. S. 2000. "Privatization and Public-Private Partnership". New York: Chatham House.
- Sembiring, Seniwati, 2008, "Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Kebijakan Pendanaan terhadap Kinerja Keuangan pada BUMN". Jurnal manajemen Vol 2, no 4. Jakarta.
- Suhardjanto dan Apreria. 2010. "Analisis Karakteristik Dewan Komisaris dan Komite Audit Serta Pengaruhnya terhadap Kinerja Keuangan". Jurnal Akuntansi XIV/2/ Mei 2010
- Sutojo. 2008. "*Good Corporate Governance*". Jakarta: PT.Damar Mulia Pustaka.
- Tjager, N. I. (et al). 2003. Corporate governance, Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia. Jakarta : PT. Prenhallindo.

www.idx.com